

HUBUNGAN SOSIAL PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2020

Lukman Rais¹, Dwia Aries Tina Pulubuhu², M. Ramli AT³

¹Mahasiswa Program Magister Sosiologi, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia

²Guru Besar Sosiologi, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia

³Dosen Magister Sosiologi, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia

*Korespondensi: Lukmanrais28@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze social relations after the implementation of the regional head election in Maros District in 2020. The research method used is qualitative with phenomenological research type. Determination of research informants by purposive sampling where the research informants as many as 10 (ten). In addition, observations and qualitative analysis were carried out. The results of the study show that the election of regional heads creates deharmonization in social relations and creates the destruction of group unity even within the family. The destruction of family networks becomes a new problem in society and even creates a negative stigma between others. After the election of regional heads, there are various forms of social relations where relationships are easily restored at the elite level, namely between fellow political parties and even cooperation and membership transfers occur, resulting in collaboration between parties. In this collaboration and cooperation is formed on the basis of status and work. At the elite level, such as between the contestants, there has not been any cooperation and it is limited to improving communication. What is of concern at the lower level is that they have high fanaticism so that social relations have not been able to be restored, and even programs to improve cross-community relations have not been achieved so as to create latent conflicts in society. This conflict eventually gave birth to segregation with communication patterns based on the direction of support and created opposition within the government.

Keywords: *Social Relations, Cooperation, Segregation and Opposition*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sosial pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maros tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Penentuan informan penelitian dengan *purposive sampling* dimana informan penelitian sebanyak 10 (sepuluh). Selain itu dilakukan observasi dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemilihan kepala daerah membuat disharmonisasi dalam hubungan sosial yang menciptakan hancurnya kesatuan kelompok bahkan sampai di dalam keluarga. Hancurnya jejaring keluarga menjadi masalah baru dalam masyarakat bahkan memunculkan stigma negative antara sesama. Pasca pemilihan kepala daerah bentuk hubungan sosial bervariasi dimana hubungan yang mudah dipulihkan pada level elit yaitu antara sesama partai politik bahkan terjalin kerja sama dan perpindahan keanggotaan sehingga terjadi kolaborasi antara partai. Dalam kolaborasi dan kerja sama ini terbentuk atas dasar status dan pekerjaan. Sedangkan pada level elit seperti antara kontestan belum terjadi kerja sama dan sebatas perbaikan komunikasi. Selain itu yang menjadi perhatian adalah pada level bawah yang memiliki fanatisme tinggi sehingga hubungan sosial belum mampu dipulihkan, bahkan program perbaikan hubungan lintas komunitas belum tercapai sehingga menciptakan konflik laten dalam masyarakat. Konflik ini akhirnya melahirkan

segregasi dengan pola komunikasi berdasarkan arah dukungan serta menciptakan oposisi dalam pemerintahan.

Kata Kunci: *Hubungan Sosial, Kerja Sama, Segregasi dan Oposisi*

PENDAHULUAN

Tulisan ini untuk menganalisis hubungan sosial pasca dilaksanakannya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maros tahun 2020. Pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah, baik bupati atau walikota atau gubernur dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan konflik sering terjadi dan mengangkat isu kelompok, suku, agama, ras dan jenis kelamin sehingga membuat disharmonisasi dalam hubungan sosial.

Dahrendorf (Ritzer, 2012) konflik dalam dunia perpolitikan penuh dengan nuansa-nuansa kepentingan, baik kepentingan yang dipertahankan sebagai status *quo*, maupun kepentingan yang akan diperjuangkan sebagai dasar untuk mencapai suatu perubahan. Kelompok atau orang-orang yang berada dalam level penguasa (*superiordinasi*) yang memiliki otoritas, dengan yang berada di luar level

penguasa atau yang ter subordinasi, didefinisikan sebagai suatu kelompok yang bergerak atas dasar kepentingan. Konflik kepentingan inilah yang melahirkan masalah ketika kelompok tertentu kalah sehingga membuat hubungan sosial ke arah disosiatif.

Hubungan sosial biasa disebut interaksi sosial atau proses sosial yang merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial, utamanya dalam aktivitas politik dalam menghadapi pemilihan kepala daerah secara serentak yang menjadi fokus penelitian. Sementara syarat terjadinya interaksi adalah adanya kontak sosial (*sosial-contact*) dan komunikasi (Soekanto, 2010). Kontak secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh dan secara fisik terjadi jika ada hubungan badaniah. Lalu komunikasi adalah bahwa individu atau kelompok memberikan tafsiran pada perilaku individu lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap, perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.

Selo Soemardjan (Soekanto, 2010) menjelaskan bentuk hubungan sosial dapat berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*), bahkan juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Suatu pertikaian dapat diselesaikan sementara waktu yang dinamakan akomodasi (*accommodation*) yang berarti kedua pihak yang bertikai belum tentu puas sepenuhnya. Bentuk hubungan sosial inilah yang akan dianalisis lebih jauh pasca pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maros.

Pada tahun 2020 hampir semua daerah di Indonesia telah melakukan pemilihan kepala daerah serentak dimana sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota melaksanakan pesta demokrasi tersebut (KPU, 2021). Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak dan tercatat merupakan kali kelima melakukannya pada era demokrasi langsung.

Indeks Kerawanan Pemilu (Bawaslu, 2020) menjelaskan sejumlah kerawanan yang terjadi pada pemilihan umum seperti tingginya biaya politik yang rentan memunculkan konflik terutama

yang menggunakan isu suku, agama, budaya dan jenis kelamin serta kontrol pusat ke daerah yang lemah dengan kehadiran politik dinasti yang mengakar sehingga dapat memicu konflik horizontal dalam masyarakat. Konflik horizontal ini sangat penting untuk dikaji dalam melihat efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum dengan kondisi sosial masyarakat yang rawan terpolarisasi atas kepentingan politik.

Hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat kerawanan akan konflik sosial pada pemilihan kepala daerah kategori tinggi yaitu Pulau Papua - Maluku mencapai 28,2 persen, Pulau Sulawesi mencapai 21,9 persen, Pulau Jawa mencapai 21,8 persen, sementara kategori sedang di Pulau Kalimantan mencapai 17,8 persen, lalu kategori rendah di Pulau Bali-Nusa Tenggara mencapai 13,6 persen dan Pulau Sumatera sebesar 12 persen. Melihat pemetaan kategori tersebut seharusnya program pendidikan politik harus lebih ditingkatkan untuk mencegah konflik membesar dan mengancam integrasi sosial. Sementara hal ini juga memunculkan potensi kerawanan sangat besar jika tidak mampu di transformasi, terutama dalam penelitian ini yang menjadi

lokasi penelitian di Pulau Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan kerawanan tertinggi ada di pemilihan kepala daerah Kota Makassar dengan 61,65 persen, pemilihan kepala daerah Kabupaten Maros dengan 61,62 persen dan pemilihan kepala daerah Kabupaten Selayar dengan 60,25 persen. Indeks kerawanan tersebut termasuk pada level tinggi yaitu 5 (lima) (Bawaslu Sulsel, 2020).

Lebih lanjut lagi konflik politik di pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maros tahun 2020 dimana konflik yang sering terjadi bersumber dari pelanggaran pidana yang berjumlah 22 kasus, dimana pada pelanggaran pidana kasus yang paling banyak pada netralitas Aparatur Sipil Negara dan politik uang yang masing-masing berjumlah 8 (delapan) kasus pelanggaran kode etik 3 (tiga) kasus dan pelanggaran administrasi 1 (satu) kasus (Bawaslu, 2020).

Pada tahapan kampanye dengan 22 jenis pelanggaran sementara paling sedikit pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dengan 1 (satu) jenis pelanggaran dengan hanya 12 laporan dan 44 temuan

pelanggaran. Pada semua tahapan jenis pelanggaran paling banyak pada pelanggaran hukum yang membuat konflik menjadi tajam. Melihat data tersebut kerawanan menjadi hal sangat penting ditangani.

Pesta demokrasi di Kabupaten Maros tahun 2020 seharusnya telah berada digaris finish pasca penetapan pemenang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros pada 23 Januari 2021 yang memenangkan pasangan Chaidir Syam–Suhartina Bohari dengan 42,3 persen dibanding penantang terkuatnya pasangan Andi Harmil Mattotorang –Andi Ilham Nadjamuddin dengan perolehan suara 33 persen, lalu pasangan Andi Tajerimin Nur - Havid S. Pasha dengan 24,7 persen (KPU, 2021).

Sesungguhnya ketajaman konflik pada pemilihan daerah di Kabupaten Maros tidak sampai pada level darurat dan berbahaya karena hanya sebatas pada isu identitas, politik dinasti, gender dan isu korupsi bupati sebelumnya yang menyeret salah satu pasangan calon yang belum terbukti kebenarannya. Tetapi kasus yang terjadi terus berulang dan menjadi lingkaran yang terus menerus berputar yang akhirnya mereda dengan sendirinya. Konflik ini akan mereda dan terkikis

seiring dengan pendekatan budaya, terkhusus pada budaya bugis makassar yang masih kental sehingga penyelesaian konflik tidak sampai menggunakan jalur formal. Tetapi hal ini harus diselesaikan sesegera mungkin sehingga tidak membesar yang dapat menciptakan masalah yang besar pula dikemudian hari dan terpelihara sampai pemilihan berikutnya.

Kontestasi pasca pemilihan menjadi hal penting diperhatikan, karena pasca pelantikan yang dilakukan serentak di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada 26 Februari 2021 beberapa elite menyerukan rekonsiliasi dan perbaikan hubungan sosial. *Elite* tersebut seperti pasangan bupati terpilih, Chaidir Syam – Suhartina Bohari dan pasangan Andi Tajerimin Nur – Havid S. Pasha, termasuk tim pemenangnya. *Elite* Partai dan tim pemenang menyerukan penyatuan kembali dan mencoba berkomunikasi untuk mengembalikan kondisi sebelum pemilihan. Antara pasangan calon telah memberikan ucapan selamat kemenangan, saling mendatangi dan bersilaturahmi, lalu bagaimana dengan tim pemenang dan simpatisan sampai akar rumput. Apakah kelegowoan untuk memperbaiki hubungan serta menerima kekalahan ini juga dirasakan, serta masyarakat secara umum.

Pendidikan politik ini sangat baik untuk diteladani, dimana selesainya pesta demokrasi, para *elite* dan kontestan pemilu mencoba menjalin hubungan lagi dengan pesaingnya. Melihat hal tersebut, upaya ini merupakan salah satu langkah untuk memulai hubungan yang baru pasca pertarungan dalam pemilihan kepala daerah. Apakah dalam upaya tersebut terjalin negosiasi sehingga tercipta kerja sama dan akomodasi atau tetap menjadi penyeimbang dalam pemerintahan yang akhirnya melahirkan oposisi yang menjadi penyeimbang dalam pemerintahan atau terjadi segregasi dalam masyarakat atas perbedaan pilihan yang melahirkan polarisasi dan pada akhirnya stigma antar masyarakat menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan. Sehingga menjadi titik penting dalam penelitian ini akan mencoba menganalisis hubungan sosial dan bentuknya pasca pemilihan kepala daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

ilmiah (Moleong, 2007). Sementara tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi, yaitu ilmu yang menggambarkan apa yang seseorang terima, apa yang dirasakan dan diketahui di dalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya dan apa yang muncul dari kesadaran itulah yang disebut sebagai fenomena. (Moustakas, 1994). Sementara untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan dengan pertimbangan khusus dan layak dijadikan sampel (Noor, 2013). Dalam penelitian ini informan penelitian berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri atas kontestan calon bupati/wakil bupati, tim sukses/partai politik, tim simpatisan/pendukung, penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu) dan akademisi serta tokoh pemuda.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhan. Semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola budaya yang dikaji peneliti (Gunawan, 2015). Analisis data

yang digunakan dimulai dari Reduksi data, paparan data sampai pada Penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi dan *member check* (Sugiyono, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Sosial Pasca Pemilihan Kepala Daerah

Hubungan sosial merupakan hubungan-hubungan yang dinamis dan menyangkut hubungan antara individu dengan individu, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara individu dengan kelompok (Soekanto, 2010). Hubungan sosial itu menimbulkan kesan didalam pikiran individu yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya. Pada pemilihan kepala daerah hubungan sosial berubah bentuk menjadi kompetisi untuk memenangkan pasangan usungannya dan berubah menjadi konflik kepentingan. Memanasnya kontestasi dan tindakan yang dilakukan yang mengarah kepada kampanye negative semakin membuat pemilihan kepala daerah tidak sehat lagi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hubungan sosial sebelum pemilu sangat harmonis, baik dengan

kontestan dan tim pemenang yang ditunjukkan dengan deklarasi pilkada damai yang dilakukan pada 10 September 2022 yang di ikuti oleh semua stekholder, dimulai dari para kontesatan dengan tim pemenangnya, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu berserta pihak Kepolisian dan TNI. Pada deklarasi pilkada damai itu memunculkan symbol bahwa pilkada ini harusnya berjalan sejuk dan tidak ada sekat yang pada akhirnya melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Pasca selesainya pemilu semuanya berubah. Ada jarak yang diciptakan oleh antara pihak yang menang dan pihak yang kalah. Suhu hubungan sosialnya pasca pemilihan sampai sekarang masih panas, tetapi tim pemenang tetap mengambil sikap untuk tenang dan tidak membuat kegaduhan yang sebenarnya dilakukan. Pasca penetapan itu terjadi aksi penolakan dari pasangan nomor urut 3 (Andi Harmil Mattotorang-Andi Ilham). Tetapi peran tokoh seperti Andi Ilham Nadjamuddin yang sangat krusial untuk menenangkan simpatisannya membuat gejolak ini bisa diatasi dimana pada tanggal 23 Januari 2020 dengan cepat mengumpulkan massa yang akan melakukan kericuhan dan menahannya sehingga gejolak konflik dapat dihindari.

Peran tokoh NU dan Muhammadiyah Maros yang pada dasarnya merupakan elit partai PAN dan PKS itu sendiri sangat krusial yang memberikan selebaran islah pasca pilkada sehingga mampu mengendalikan situasi. Hal ini sesuai dengan penelitian (Budiman & Setyahadi, 2019) yang menjelaskan peran organisasi dan tokoh yang menjadi panutan mampu meredam konflik dalam masyarakat, menjaga stabilitas dan bahu membahu dalam upaya menjaga keutuhan masyarakat. Kabupaten Maros yang merupakan kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 berjalan dinamis dimana pertarungan politik ini juga merupakan pertarungan antara elit politik yang tergabung diberbagai organisasi, baik keagamaan ataupun kepemudaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa peran organisasi ini sangat membantu dalam meredam konflik yang pada dasarnya mereka adalah satu rumpun keluarga besar yang meskipun berbeda warna dan pilihan masih tetap menjunjung tinggi budaya *sipakainga*, *sipakatau* dan *sipakalabbiri*.

Hubungan sosial sebelum adanya pemilihan kepala daerah sangat harmonis dan penuh dengan kekeluargaan yang tercermin dalam falsafah *sipakainga*, *sipakalabbiri* dan *sipakatau*. Sementara

setelah pemilihan itu berubah karena kontestasi ini melahirkan konflik. Ada potensi untuk memperuncing hubungan sosial ini, tetapi tradisi dan budaya yang mengakar kuat serta ketokohan menjadi kunci yang membuat tim dan simpatisan bisa menahan diri. Bahkan pasca pemilihan dalam keluarga sendiri terjadi konflik. Suhu hubungan sosialnya sangat panas karena masing-masing mempertahankan prinsipnya untuk calon yang paling baik menurutnya ditambah dengan kepentingan yang meraka ingin capai. Hal ini sesuai dengan penelitian (Loilatu, S, & Salviana, 2015) yang menjelaskan tradisi keagamaan dan kearifan lokal konflik ini dapat diselesaikan dengan menggunakan perdamaian positif, pelebagaan nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi perilaku kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan konflik baru. Begitupun pada pilkada Maros yang dimana sipakatau memiliki fungsi hubungan emosional dan ikatan darah mampu meredam konflik karena antar kontestan, tokoh partai/pemenang sampai simpatisan merupakan rumpun keluarga. Sipakainga, Ada peran tokoh, utamanya kontestan untuk menahan gejolak konflik yang diikuti dimulai dari tim pemenang sampai simpatisan, bahkan sampai ada peran organisasi keagamaan, seperti NU dan

Muhammadiyah. Lalu *sipakalabbiri*, yaitu Rasa menghargai dan malu terhadap pelanggaran dan penyimpangan yang melanggar nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Ada budaya siri yang dipegang dan penghormatan terhadap sesama.

Dampak sosial pada pemilihan ini membuat hubungan tidak harmonis dan menciptakan hancurnya kesatuan kelompok bahkan di keluarga sendiri. Pada dasarnya pesta demokrasi ini melahirkan kondisi yang rawan. Harus ada upaya untuk memulihkan hubungan sosial sehingga hal itu bisa menjadi normal kembali. Pada dasarnya proses hubungan sosial ini berbentuk konflik karena perbedaan kepentingan, dalam hal ini kepentingan politik yang menjadi sumber utama retaknya hubungan sosial pasca pemilihan kepala daerah. Hubungan sosial pasca pemilihan penuh dengan konflik hasil dari kompetisi untuk memperoleh kekuasaan. Hubungan sosial ini menjadi tidak kondusif dan menciptakan dampak sosial yang sangat besar, termasuk hancurnya kesatuan kelompok, hancurnya jejaring keluarga karena perbedaan pilihan bahkan dalam keluarga inti itu sendiri, tetapi disisi lain juga menciptakan solidaritas intern dalam kelompok.

Dalam penelitian (Kiftiyah, 2019) menjelaskan konflik politik akan menjadi masalah jika menjurus kepada tindakan diskriminasi kepada kelompok tertentu yang mengakibatkan terjadinya polarisasi di masyarakat sehingga dapat membahayakan stabilitas dan kondisi sosial dalam masyarakat. Untuk mengatasinya dengan upaya rekonsiliasi yang diawali oleh para kontestan politik. Selain para kontestan politik peran para tokoh masyarakat dan tokoh agama karena pendapat para tokoh tersebut mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk pola pikir di masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan sosial pasca pemilihan kepala daerah membentuk deharmonisasi dalam masyarakat, utamanya pada level bawah yang merusak jejaring solidaritas dalam keluarga, membentuk stigma dan polarisasi. Sementara peran tokoh masyarakat pada level elit belum mampu menyatukan masyarakat meskipun pada kondisi tertentu mampu mengamankan kelompoknya untuk tidak melakukan tindakan diluar kendali.

Bentuk Hubungan Sosial

Pasca pemilihan kepala daerah, hubungan sosial menjadi perhatian khusus. Apakah pasca rekonsiliasi hubungan itu

akhirnya pulih, atau hubungan itu tetap sama meskipun pemilihan telah selesai. Proses perbaikan hubungan sosial itu merupakan sesuatu yang sangat baik demi kebaikan bersama. Seruan dari pemenang menjadi kunci dalam perbaikan hubungan sosial pasca pemilihan yang sesuai dengan penelitian (Kiftiyah, 2019) yang menjelaskan peran penting kontestan politik dalam proses perbaikan hubungan sosial pasca pemilihan kepala daerah.

Pasca rekonsiliasi sosial terjadi pola hubungan baru yang diciptakan. Seruan rekonsiliasi ini direspon oleh semua pihak, termasuk pada level elit seperti kontestan, tokoh partai politik dan tokoh masyarakat. Terjadi dinamika dalam kepemimpinan partai dalam rekonsiliasi ini yang menghasilkan kerja sama dan tidak ada lagi kontestasi seperti yang ditunjukkan pada pemilihan. Sementara pada pola perbaikan hubungan sosial di masyarakat, kontestan langsung turun untuk melakukan silaturahmi.

Pada perbaikan hubungan sosial menggunakan pendekatan level bawah. Upaya pendekatan yang intens ke masyarakat berfungsi untuk membuka komunikasi dan menjadi model pendekatan langsung sehingga dapat memperbaiki hubungan sosial. Sementara dalam upaya

perbaikan hubungan sosial masih belum direspon oleh kontestan lain seperti yang ditunjukkan oleh kontestan 3 (Andi Harmil Mattotorang-Andi Ilham) yang sebelumnya telah dilakukan perbaikan hubungan namun belum berhasil dimana masih terjadi segregasi sosial.

Sehingga upaya perbaikan hubungan belum direspon oleh pihak lain, meskipun ajakan itu ada. Harus menjadi perhatian bahwa upaya rekonsiliasi sosial belum berhasil membuka perbaikan hubungan sosial dalam masyarakat, terutama pada level bawah di wilayah kemenangan kontestan 3 (Andi Harmil Mattotorang-Andi Ilham). Ada perbedaan tajam antara perbaikan hubungan pada level elit dengan level bawah. Hal ini sesuai dengan penelitian (Nutfu & Anwar, 2014) yang menjelaskan bahwa kegagalan perbaikan hubungan sosial berimbas pada terjadinya segregasi sosial yang berpeluang membentuk kembali sentimen *in-group* dan *out-group*, tumbuhnya stigma dan prasangka sosial, sehingga berpotensi menumbuhkan kembali potensi konflik baru.

Pada dasarnya hubungan sosial pasca pemilihan kepala daerah sangat mudah dipulihkan karena kontestan, tim pemenang memiliki hubungan

kekeluargaan karena satu rumpun. Secara emosional mereka diikat oleh ikatan darah. Yang menjadi perhatian khusus bahwa dalam hubungan sosial yang diperlihatkan pasangan calon sampai simpatisan pada level atas sangat harmonis, namun hal itu tidak diperlihatkan pada level bawah yang suhunya masih memanas sampai saat ini. Sementara pada level partai dengan kepentingannya mampu dengan cepat memperbaiki hubungan sosial bahkan terjadi kerja sama bahkan perpindahan anggota partai ke partai lainnya. Hal itu ditunjukkan oleh kontestan nomor 2 (dua) Suhartina Bohari yang pada 10 April 2021 secara resmi dilantik oleh DPD II Partai Golkar sebagai ketua umum periode 2021-2026 pada musyawarah daerah X Golkar Maros di Hall Grand Town, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros (Limonu, 2021).

Lalu terjadi penguatan untuk koalisi. Hal ini ditunjukkan oleh Partai PKS dan Partai Nasdem yang menjejaki kerja sama dan koalisi lanjutan menuju Pilkada tahun 2024, dimana pada 22 Juni 2021 Ketua DPD PKS Maros, Kartomas Karim dan Ketua DPD Nasdem Maros, Andi Harmil Mattotorang melakukan komunikasi dan silaturahmi dalam memperkuat koalisi (Mata, 2021).

Sementara itu terjadi evaluasi kader dimana anggota DPRD Maros dari Partai Golkar Wahyuni Malik dipecat dari Golkar Maros berdasarkan rapat pleno pada 29 September 2021 di Kantor DPD II Partai Golkar karena melanggar AD/ART partai, termasuk penegakan disiplin kader dan pengurus serta anggota (Fajar, 2021).

Sementara pada hubungan sosial antara kontestan terjadi perbaikan hubungan yang ditandai oleh komunikasi yang mulai dilakukan, bahkan pasca pemilihan hubungan itu masih tetaap harmonis karena selain memiliki hubungan keluarga, antara kontestan juga memiliki ikatan pertemanan sejak dahulu.

Sehingga bentuk hubungan sosial pada pemilihan kepala daerah adalah kerja sama, differensiasi dan oposisi. Bentuk kerja sama terjadi di kontestan dengan partai politik dimana terjadi perpindahan keanggotaan yang sebelumnya kompetitor menjadi bagian dari partai politik tersebut. Seperti yang dicontohkan oleh Suhartina Bohari yang sebelumnya adalah kader di Partai Amanat Nasional (PAN) dan mengantarnya menjadi wakil bupati menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Maros yang sebelumnya pengusung utama pasangan Andi Tajerimin Nur – Hafied S Pasha.

Sementara di tim pemenang perpindahan H. Malik dan keluarganya dari Partai Golongan Karya (Golkar) ke Partai Nasional Demokrasi (Nasdem). Terjadi penguatan koalisi pada partai yang kalah untuk menatap pemilu tahun 2024. Sementara itu terjadi differensiasi atas nama pekerjaan antara tim pemenang dengan kontestan. Hubungan ini lebih rasional karena terbangun atas profesionalisme dan tuntutan pekerjaan.

Lalu pada kontestan dengan kontestan belum tercapai kerja sama. Hal ini dikarenakan proses akomodasi yang masih berlangsung sampai saat ini di tubuh pasangan calon yang menang. Lalu terjadi hubungan sosial yang bersifat oposisi yang menempatkan dirinya di luar pemenang. Tim pemenang sampai simpatisan menjadi oposisi kritis dalam mengawal setiap kebijakan pemerintahan yang utamanya dilakukan oleh tim pemenang pasangan Andi Harmil Mattotorang – Andi Ilham Nadjamuddin. Pilihan itu terkait dengan ideologi dan fanatisme. Lalu pada level bawah sampai sekarang masih tercipta upaya harmonisasi hubungan, dimana Bupati Maros beserta tim pemenangnya masih turun ke masyarakat untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi.

SIMPULAN

Pemilihan kepala daerah membuat hubungan sosial tidak harmonis dan menciptakan hancurnya kesatuan kelompok bahkan di keluarga sendiri. Hancurnya jejaring keluarga menjadi masalah baru bahkan memunculkan stigma negative antara sesama. Pasca seruan perbaikan hubungan sosial terjadi upaya harmonisasi yang terjalin antara kontestan meskipun sampai saat ini belum tercipta kolaborasi/kerja sama. Hubungan sosial antar kontestan dengan partai politik

maupun antar partai terjalin dinamis, terjadi perpindahan keanggotaan dan melakukan kerja sama tetapi ada evaluasi yang membuat anggota partai dipecat. Hubungan sosial antar kontestan dengan tim pemenang/ simpatisan maupun antar tim pemenang terjalin dinamis, karena ada tim pemenang/simpatisan yang responsive bahkan bekerja sama dalam pekerjaan, tetapi ada tim yang masih menjaga jarak dan memilih menjadi oposisi/mitra kritis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu. (2020). *DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020 di Kabupaten Maros*. Maros: Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses.
- Bawaslu. (2020, Maret). Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada Serentak tahun 2020. *Badan Pengawas Pemilu Indonesia*. Jakarta.
- Bawaslu Sulsel. (2020). Indeks Kerawanan Pemilu Sulawesi Selatan Per-November 2020. Makassar: Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan.
- Budiman, S. A., & Setyahadi, M. M. (2019). Peran Ormas Islam Dalam Menjaga Stabilitas Politik Sosial Budaya Indonesia Pasca Pemilu 2019 (Kajian Pustaka Pada Organisasi Islam Terbesar NU dan Muhammadiyah). *Jurnal Renaissance*, 4, 560-563.
- Fajar. (2021, September 26). *Fajar News*. Dipetik Agustus 22, 2021, dari Fajar News: <https://fajar.co.id/2021/09/26/suami-pindah-partai-golkar-pecat-kadernya-di-maros/>
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kaulitatif, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kiftiyah, A. (2019). Upaya Rekonsiasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, Vol. 3, 63-75.
- KPU. (2021, Januari 25). *Pilkada 2021*. Diambil kembali dari <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/rekapitulasi/>
- Limonu, N. (2021, April 10). *Sindo News*. Dipetik Agustus 21, 2021, dari Suhartina Bohari Terpilih sebagai Ketua Golkar Maros: <https://makassar.sindonews.com/read/393068/713/suhartina-bohari-terpilih-sebagai-ketua-golkar-maros-1618052664>

- Loilatu, M. J., S, Y. H., & Salviana, V. (2015). Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015.
- Mata, M. (2021, Juni 22). *Redaksi*. Dipetik Agustus 22, 2021, dari Mata Maros: <https://www.matamaros.com/2021/06/22/pks-dan-nasdem-jajaki-koalisi-lanjutan-di-maros/>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. California: SAGE Publications.
- Noor, J. (2013). *Metedologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nutfa, M., & Anwar, S. (2014). Membangun Kembali Perdamaian : Rekonsiliasi Komunal Berbasis Trust. *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1*, 133-142.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.

PROFIL SINGKAT

Penulis bernama Lukman Rais, lahir di Maros, 28 Agustus 1991. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Program Magister Sosiologi di FISIP Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini bekerja sebagai peneliti di Lembaga Survei Indonesia (LSI) wilayah Indonesia Timur dan Peneliti Putilbang Kemenag Indonesia. Sehari-hari aktif di pesantren sebagai pendidik.